



DAMPAK SOSIAL PROYEK PERKEBUNAN TEBU PT GLOBAL PAPUA ABADI TERHADAP MASYARAKAT ADAT DI MERAUKE, PAPUA SELATAN

**Indar Kasmawati¹, Elisa Riza Umami², Putri Yuniati³, Syarif
Hidayatullah⁴, Paulus Ngilawana⁵**

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik, Universitas Musamus, 1,2,3,4,5

Email: syrifpoco211@gmail.com⁴

Received: 10-10-2025

Accepted: 15-11-2025

Published: 15-12-2025

Abstract

The development of the sugarcane plantation project by PT Global Papua Abadi in South Papua represents one of the prominent large-scale agribusiness initiatives in the Merauke region. This study aims to analyze the social impacts of PT Global Papua Abadi's sugarcane project on Indigenous communities in Merauke. The research method used is a literature study by analyzing secondary data from scientific journals, research reports, and policy documents. The findings reveal three main social impacts: (1) changes in land access and the loss of traditional zones for hunting, gathering, and harvesting sago, which threaten cultural resilience; (2) the transformation of livelihoods from a subsistence economy to a cash economy, creating internal inequalities within the community; and (3) social fragmentation caused by differing attitudes toward the project, which weakens the cohesion of Indigenous communities. These findings highlight the need for a development approach that respects Indigenous rights and promotes inclusive and sustainable regional growth.

Keywords: *Sugarcane plantation, PT Global Papua Abadi, Indigenous communities*

Abstrak

Pengembangan proyek perkebunan tebu oleh PT Global Papua Abadi di Papua Selatan merupakan salah satu inisiatif agribisnis skala besar yang menonjol di wilayah Merauke. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap masyarakat adat Merauke. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menganalisis data sekunder dari jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan tiga dampak sosial utama: (1) perubahan akses lahan dan hilangnya zona tradisional berburu, meramu, dan mengambil sago yang mengancam ketahanan budaya; (2)

transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal komunitas; dan (3) fragmentasi sosial akibat perbedaan sikap terhadap proyek yang melemahkan kohesi masyarakat adat. Temuan ini menegaskan perlunya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan.

Kata Kunci: Perkebunan tebu, PT Global Papua Abadi, masyarakat adat

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam dekade terakhir semakin diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam berbasis kawasan melalui kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, menjadi wilayah prioritas nasional karena memiliki potensi lahan yang luas bagi pengembangan sektor pertanian skala besar. Pemerintah menempatkan Merauke sebagai salah satu pusat produksi pangan dan energi masa depan melalui pengembangan perkebunan tebu dan bioenergi (Kompas, 2024).

PT Global Papua Abadi (GPA) merupakan salah satu perusahaan pelaksana proyek perkebunan tebu berskala besar dengan konsesi lahan sekitar 30.000 hektare di Merauke. Perusahaan ini berperan dalam pengembangan perkebunan, pembangunan pabrik gula dan bioetanol, serta pembibitan tebu menggunakan teknologi pertanian. Proyek ini ditempatkan sebagai komponen penting dalam mendukung agenda ketahanan pangan dan energi nasional.

Namun, pelaksanaan proyek di Papua menimbulkan dinamika sosial yang kompleks. Wilayah Merauke merupakan daerah dengan keberagaman kultur khas masyarakat adat, terutama dari suku Marind Anim dan kelompok etnis lainnya yang memiliki keterikatan kuat dengan tanah, hutan, dan ekosistem sekitar sebagai bagian dari identitas kultural dan spiritual mereka. Sistem penguasaan lahan berbasis marga dengan konsep tanah ulayat tidak sekadar dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai ruang hidup yang sakral dan sumber identitas kolektif (Solapari et al., 2024).

Pada tahun 2025, terdapat laporan dari sekitar 75 keluarga Orang Asli Papua (OAP) di Merauke mengenai dugaan penyerobotan tanah adat oleh perusahaan pelaksana PSN yang dilaporkan kepada aparat berwenang (Tribun Papua, 2025). Laporan ini mencerminkan bahwa pembangunan skala besar tidak dapat dilepaskan dari persoalan agraria, terutama di daerah yang struktur kepemilikan tanahnya berbasis adat. Konflik agraria di Papua umumnya berakar pada ketiadaan mekanisme Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang efektif dan lemahnya penegakan hukum yang melindungi hak-hak masyarakat adat (Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik, 2023).

Penelitian ini berfokus pada analisis dampak sosial proyek tebu PT Global Papua Abadi terhadap kehidupan masyarakat adat Merauke, khususnya terkait perubahan akses lahan, transformasi mata pencaharian, dan dinamika kohesi sosial komunitas. Dengan memahami

dinamika tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi wacana pembangunan inklusif di Papua Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur akademik. Kajian literatur adalah penelitian yang meninjau dan mengkaji secara kritis gagasan atau temuan yang terdapat dalam literatur berorientasi akademik serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan ilmiah yang terdapat dalam artikel atau jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, serta publikasi media massa yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa proyek perkebunan tebu PT Global Papua Abadi memberikan dampak sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat adat di wilayah Merauke. Dampak sosial ini dapat diidentifikasi melalui tiga aspek utama yang saling terkait dan membentuk perubahan struktural dalam kehidupan masyarakat adat.

Perubahan Akses Lahan dan Hilangnya Ruang Hidup Tradisional Dampak sosial pertama yang paling mendasar adalah perubahan akses masyarakat adat terhadap lahan dan sumber daya alam tradisional mereka. Konversi lahan dalam skala luas menjadi perkebunan tebu telah mengubah struktur penguasaan dan pemanfaatan ruang hidup masyarakat adat yang sebelumnya dikelola secara komunal berdasarkan sistem marga.

Masyarakat adat yang hidup dalam sistem penguasaan tanah berbasis marga mengalami penyesuaian fundamental setelah sebagian wilayah mereka masuk dalam area konsesi perusahaan. Aktivitas tradisional seperti berburu rusa, babi hutan, dan kasuari; meramu sagu; serta mengumpulkan hasil hutan mengalami penyusutan ruang yang signifikan. Zona-zona yang selama ini menjadi tempat berburu dan meramu kini telah berubah menjadi perkebunan tebu yang tertutup bagi akses masyarakat (Samho & Purwadi, 2023).

Perubahan ini tidak hanya terkait berkurangnya ruang aktivitas ekonomi, tetapi juga mengubah persepsi masyarakat terhadap nilai tanah. Tanah yang sebelumnya bernilai budaya dan spiritual sebagai warisan leluhur kini mulai dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat diperjualbelikan atau disewakan. Transformasi makna tanah dari sacred space menjadi commodity space ini merupakan pergeseran epistemologis yang mendalam dalam kosmologi masyarakat adat. Hilangnya akses terhadap sumber daya alam tradisional juga mengancam keberlanjutan sistem pengetahuan lokal (indigenous knowledge system) yang diwariskan secara turun-temurun. Aktivitas berburu dan meramu merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan transmisi pengetahuan dari generasi tua kepada generasi muda. Pengurangan kesempatan melakukan aktivitas tersebut berarti pengurangan kesempatan transmisi pengetahuan antargenerasi, yang pada gilirannya mengancam keberlanjutan identitas kultural masyarakat adat (Mohd Salim et al., 2023).

Transformasi Mata Pencaharian dan Ketimpangan Ekonomi Internal Dampak sosial kedua adalah transformasi pola mata pencaharian masyarakat adat dari ekonomi subsisten berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi uang yang terintegrasi dengan pasar. Masuknya proyek tebu menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat adat melalui

pekerjaan di perkebunan sebagai buruh harian, operator alat, tenaga keamanan, dan aktivitas pendukung lainnya. Peluang ini memberikan akses terhadap pendapatan tunai yang sebelumnya tidak tersedia dalam ekonomi subsisten tradisional.

Namun, transformasi ekonomi ini tidak berjalan merata dan menciptakan ketimpangan internal dalam komunitas. Kelompok yang mampu menyesuaikan diri dengan pola kerja industri, memiliki keterampilan tertentu seperti kemampuan berbahasa Indonesia, pendidikan formal, dan akses informasi yang memadai dapat memperoleh manfaat lebih besar. Mereka dapat memperoleh posisi pekerjaan yang lebih baik dengan upah yang lebih tinggi. Sebaliknya, kelompok yang masih bergantung pada aktivitas subsisten, tidak memiliki pendidikan formal yang memadai, dan tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik menghadapi kesulitan untuk beradaptasi. Mereka cenderung hanya mendapat pekerjaan sebagai buruh harian dengan upah minimum tanpa jaminan sosial yang memadai. Ketergantungan mereka terhadap sumber daya alam dan risiko kerentanan ekonomi tetap tinggi, bahkan meningkat karena akses terhadap sumber daya alam tradisional sudah berkurang.

Transformasi ekonomi juga mengubah pola konsumsi rumah tangga secara fundamental. Pangan tradisional seperti sagu, ikan, dan hasil buruan kini sebagian digantikan oleh produk pangan modern seperti beras dan makanan olahan yang dibeli dengan uang tunai. Pergeseran ini mengubah keseimbangan ketahanan pangan lokal. Masyarakat menjadi lebih rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan di pasar, berbeda dengan sistem pangan tradisional yang meskipun sederhana namun lebih mandiri dan berkelanjutan. Lebih jauh lagi, sistem kerja industri mengurangi waktu yang tersedia untuk aktivitas sosial-budaya tradisional seperti ritual adat, pertemuan marga, dan kegiatan gotong royong. Terutama bagi laki-laki yang bekerja di perkebunan, waktu untuk mengajarkan anak-anak tentang teknik berburu atau memahami wilayah adat menjadi sangat terbatas, yang berdampak pada terputusnya mata rantai transmisi budaya antargenerasi.

Fragmentasi Sosial dan Melemahnya Kohesi Komunitas Dampak sosial ketiga adalah terjadinya fragmentasi sosial

dan melemahnya kohesi komunitas akibat perbedaan sikap terhadap proyek perkebunan tebu. Perubahan ekonomi dan pemanfaatan lahan memengaruhi struktur dan dinamika sosial masyarakat adat secara mendalam. Perbedaan pandangan terkait proyek antara kelompok yang menerima karena manfaat ekonomi dan kelompok yang menolak karena ingin mempertahankan nilai budaya dan akses terhadap tanah adat menimbulkan ketegangan internal yang signifikan. Fragmentasi ini tidak hanya terjadi antar-marga tetapi juga di dalam marga itu sendiri, antara generasi tua yang cenderung mempertahankan nilai tradisional dengan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan ekonomi.

Ketegangan horizontal semacam ini melemahkan kohesi sosial yang selama ini menjadi kekuatan utama masyarakat adat dalam menghadapi tekanan eksternal. Konflik internal membuat masyarakat adat menjadi lebih rentan karena energi kolektif terpecah untuk menyelesaikan persoalan internal daripada menghadapi tantangan eksternal secara

bersama-sama. Nilai-nilai adat yang selama ini menekankan hubungan harmonis dengan alam, sistem kekerabatan berbasis marga, dan ritual leluhur mulai mengalami pergeseran, terutama pada generasi muda. Mobilitas penduduk meningkat, interaksi sosial menjadi lebih heterogen dengan masuknya pekerja dari luar daerah, dan pola relasi antara individu dan komunitas mengalami penyesuaian fundamental.

Struktur kelembagaan adat juga terdampak karena kepala marga dan tokoh adat harus menyeimbangkan kepentingan tradisional dengan tuntutan administratif modern dan negosiasi dengan perusahaan. Dalam beberapa kasus, muncul kepemimpinan baru yang berbasis pada kemampuan bernegosiasi dengan pihak eksternal, yang tidak selalu sejalan dengan sistem kepemimpinan tradisional berbasis keturunan atau prestise spiritual. Hal ini menimbulkan dualisme kepemimpinan yang dapat melemahkan legitimasi kedua bentuk kepemimpinan tersebut. Secara keseluruhan, ketiga dampak sosial ini saling terkait dan membentuk transformasi struktural dalam kehidupan masyarakat adat Merauke. Perubahan akses lahan memicu transformasi ekonomi, yang pada gilirannya menciptakan fragmentasi sosial. Proses ini menunjukkan bahwa proyek PT Global Papua Abadi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi turut membentuk ulang relasi sosial, struktur kekuasaan adat, sistem pengetahuan lokal, serta identitas budaya masyarakat adat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek perkebunan tebu PT Global Papua Abadi membawa dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat adat di Merauke. Konversi lahan adat menjadi area konsesi perusahaan mengubah struktur penguasaan ruang hidup masyarakat, di mana aktivitas tradisional seperti berburu, meramu, dan pengambilan sagu mengalami penyusutan ruang yang memengaruhi ketahanan budaya. Perubahan makna tanah dari sacred space menjadi commodity space merupakan transformasi epistemologis yang mengancam sistem pengetahuan lokal dan identitas kultural masyarakat adat. Proyek ini juga mendorong transformasi mata pencaharian dari ekonomi subsisten ke ekonomi uang yang menciptakan ketimpangan internal karena tidak semua kelompok memiliki keterampilan untuk beradaptasi. Perbedaan sikap terhadap proyek menimbulkan fragmentasi sosial dan melemahnya kohesi komunitas, sementara masuknya pekerja dari luar daerah dan pergeseran nilai-nilai adat pada generasi muda menantang keberlangsungan praktik budaya tradisional. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang menghormati hak-hak masyarakat adat, menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) secara efektif, dan mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif serta berkelanjutan melalui penguatan mekanisme partisipasi masyarakat adat dalam setiap tahap proyek pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik. (2023). Melindungi Hak Ulayat Masyarakat Adat dan Selamatkan Hutan Adat Papua. 0-18. <https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2023/10/2edde10f-amicus-curiae-for-awyu-kika-papua.pdf>
- Mohd Salim, J., Anuar, S. N., Omar, K., Tengku Mohamad, T. R., & Sanusi, N. A. (2023). The impacts of traditional ecological knowledge towards indigenous peoples: A systematic literature review. *Sustainability*, 15(1), 824.

- Samho, B., & Purwadi, Y. S. (2023). Menelisik Dampak Perkebunan Kelapa Sawit Bagi Hutan Adat, Hak Ulayat, dan Visi Ekologis Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Barat. *Veritas et Justitia*, 9(2), 350-376.
- Solapari, N., Nazhiah, A., Adzkie, Z., Niluh, R., & Gracella, L. (2024). Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke. *Jurnal Inovasi Global*, 2(12), 2080-2098.
- Tribun Papua. (2025, 31 Mei). PT GPA Diduga Rampas Tanah Adat 75 Keluarga OAP, LBH Papua Merauke: Ini Kejahatan Terstruktur. Diakses pada 5 Desember 2025, <https://papua.tribunnews.com/2025/05/31/pt-gpa-diduga-rampas-tanah-adat-75-keluarga-oap-lbh-papua-merauke-ini-kejahatan-terstruktur>